

KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)

*Regynald Prasatya Tampake¹
Ronny Gosal²
Welly Waworundeng³*

Abstrak

Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas sebagai pengkoordinator, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yakni mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di seluruh kecamatan termasuk dalamnya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mencakup Partisipasi, Pembinaan dan Evaluasi di Kecamatan Malalayang ditinjau dari tugas dari fungsi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang kecamatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah kelurahan/desa. Dengan berbagai program sosialisasi pentingnya proses pemberdayaan melalui tim fasilitator dan team leader penggerak pembangunan pedesaan atau kelurahan, pembangunan fisik, lingkungan, ekonomi produktif, sosial kemasyarakatan, pembagian bantuan berupa uang dan lain sebagainya bentuk program pemberdayaan masyarakat yang sudah dan sering berjalan.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Faktor peningkatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri.

Dapat dilihat pada kebijakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat pada Peraturan Daerah tentang Perencanaan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan dan kemajuan daerah tersebut guna mencapai kemakmuran masyarakat daerah tersebut dan hal itu juga dapat

dilihat pada penghasilan perkapita dan sarana-sarana yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat terlaksana dan tercapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian awal yang penulis dapatkan bahwa kecamatan Malalayang ada beberapa Program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja pemerintah seperti program/kegiatan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program/kegiatan penyuluhan KB oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program/kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga oleh Dinas Kesehatan seringkali kurang mendapat respons atau dukungan partisipasi masyarakat setempat sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal. Terlihat selama ini camat selaku pemegang jabatan yang diberikan amanat oleh undang-undang atau mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal, belum adanya sinergitas antara kegiatan kelompok-kelompok masyarakat, dinas terkait dengan kegiatan pemerintah kecamatan.

Tinjauan Pustaka

Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Kementerian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan kata lain, koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling

mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sebutan bagi orang yang menggerakkan / mengkoordinasi unsur-unsur manajemen untuk mencapai tujuan adalah koordinator (manajer). Semakin kompleks organisasi dan manajemen maka semakin kompleks juga proses koordinasi yang harus dilakukan. Bahkan, dalam konteks organisasi swasta (private institutions), koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien. (Westra. 2013: 51)

Koordinasi adalah penyesuaian secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengkoordinasikan adalah mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan dan alat-alat dengan kebutuhan produksi dan seterusnya. Koordinasi secara singkat adalah menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan alat dengan tujuan. Stoner dan Wankel (2011:263) menyatakan koordinasi sebagai berikut:

Coordination is the process of integrating the objectives and activities of the separate units (departments of functional are as) of an organization in order to achieve organizational goals efficiently.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi itu adalah proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian-bagian dar; suatu organisasi yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner dan Wankel (2011: 228) bahwa koordinasi mempunyai aspek-aspek integrasi yakni integrasi tujuan, kegiatan dan pencapaian tujuan secara efisien bagi unit-unit atau bagian-bagian yang terpisah.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Taliziduhu Ndraha, 2013: 290)

Liang Gie dkk (201: 74), merumuskan koordinasi sebagai berikut: koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.

Money dalam Handyaningrat, (2016: 117), mengatakan bahwa koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Handyaningrat (ibid) mengemukakan bahwa koordinasi

adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut dapat disebutkan Mooney, bahwa proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya. Unit kerja yang berkepentingan dapat langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu atau memberikan feed back kepada sumber informasi atau masyarakat. Adakalanya koordinasi tidak hanya dalam bentuk forum tetapi ada juga dalam bentuk jabatan atau bentuk struktural organisasi yang banyak terjadi di lingkungan birokrasi. Menurut Suharto (dalam Swedianti, 2011:5) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya

pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Pemberdayaan menurut Kartasmita (2015:87) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Kata "berdaya" dalam kamus bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2010:215) diartikan sebagai : (1) berkemampuan; bertenaga, (2) mempunyai akal, cara; dsb, untuk mengatasi sesuatu.

United Nations (2015:83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Getting to know the local community

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa/kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artimya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. Gathering knowledge about the local community

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. Identifying the local leaders

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. Stimulating the community to realize that it has problems

Didalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. Helping people to discuss their problem

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. Helping people to identify their most pressing problems

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "people-centered, participatory, and sustainable" (chambers dalam Kartasasmita, 2005).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (2012:214) disebut alternative development, yang menghendaki "inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality"

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiono,2013:33). Afrizal (2015:13), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam penelitian ini peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka tetapi yang dianalisis adalah kata-kata atau perilaku manusia dan data yang bersifat angka digunakan sebagai pendukung argumen, interpretasi dan laporan penelitian.

Fokus penelitian dapat diartikan sebagai domain tunggal atau domain yang terkait dengan situasi sosial. Pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fisibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu (Sugiyono, 2013:26).

Penelitian ini menggunakan teori dari stoner dan wankel yakni disebutkan koordinasi adalah proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian-bagian dari suatu organisasi yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan

bersama. Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 ayat b sebagai berikut :

a) Partisipasi adalah mengikutsertakan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
c) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Malalayang
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
3. Sekretaris Kecamatan
4. 2 Lurah yang ada di Kecamatan Malalayang
5. 2 Masyarakat

Hasil Penelitian

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga mengemban

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu konsepsi dan paradigma yang saat ini cukup populer dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian. Kesejahteraan tercermin dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal finansial, maupun modal sosial yang ada.

Berbicara tentang efektivitas program maka persoalannya menjadi tumbuh kompleks apalagi diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari level sistem. Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi

setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Budiani (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (1) ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya; (2) sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. (3) tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (4) Pemantuan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Peneliti kemudian meneliti mengenai efektivitas program pemberdayaan di kecamatan malalayang dikaitkan dengan koordinasi camat selaku pimpinan kecamatan agar program berjalan dengan efektif. Salah satu program yang dijadikan patokan adalah program pemberdayaan melalui bantuan beras miskin. Alasan pemilihan contoh program ini karena program tersebut yang sering terjadi penyimpangan dan sering tidak tepat sasaran.

Peneliti mewawancarai informan masyarakat Ibu. R.P beliau mengatakan: Saya merupakan salah seorang penerima bantuan program beras miskin

di Kelurahan bahu, perlu diakui di kelurahan bahu menurut saya tidak banyak masyarakat miskin karena rata-rata penduduk disini cukup mampu, namun tetap ada masyarakat miskin faktanya masih banyak yang masuk dalam daftar peneriman, tapi menurut saya masih ada beberapa masyarakat yang saya lihat tidak cocok mendapatkan bantuan ini karena berada di ekonomi kelas menengah keatas. Menurut saya pala (kepala lingkungan) harus lebih selektif lagi. Atau harus mengupdate data yang ada, terkadang ada orang yang sudah meninggal masih masuk dalam daftar penerima.

Implementasi program bantuan masyarakat miskin khususnya beras disetiap kelurahan itu ada karena itu merupakan program pemerintah pusat di daerah tak terkecuali di kelurahan bahu, memang masih ada beberapa keluhan dari masyarakat yang saya dengar bahwa program tersebut belum tepat sasaran tapi bukan berarti hal tersebut disengaja bisa saja hal tersebut akibat mis komunikasi atau juga datanya yang kurang update, ada juga masyarakat yang tahun sebelumnya memang miskin tapi tahun berikutnya mendapatkan berkat dan belum terupdate jadi menurut saya bukan sepenuhnya salah pemerintah. Namun sebagai pemerintah kami tetap melakukan evaluasi mengenai program tersebut, ibu camat juga sering mengingatkan kembali dalam setiap kesempatan apalagi apda moment pembagian beras miskin agar kami selalu memantau dan mengevaluasi pemberian bantuan, apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

Sehubungan dari penjelasan tersebut maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus perencanaan, proses/pelaksanaan, hasil

dan peran Fasilitator yang mengacu pada hasil guna daripada suatu program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dampak dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Malalayang, peneliti melihat bahwa program beras bagi masyarakat miskin yang di kecamatan malalayang belum efektif dikarenakan masih belum siapnya pelaksanaannya dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

Kesimpulan

1. Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh camat Malalayang dilakukan secara vertical dan horizontal. Dari hasil penelitian, pelaksanaan sinkronisasi di kecamatan malalayang berjalan dengan baik, dimana setiap program dilakukan melalui komunikasi secara bertahap dan berjenjang. Namun ketidakpastian program menjadi suatu kendala sinkronisasi program.
3. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Malalayang salah satunya adalah pemberian bantuan beras miskin,

namun dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum tepat sasaran, karena masih ada beberapa nama penerima yang seharusnya tidak layak menerima bantuan namun menerima bantuan.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kecamatan Malalayang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang agar masyarakat terberdayakan melalui pemberian idenya, perlu adanya sosialisasi yang baik akan pentingnya kegiatan tersebut terlebih sekarang telah ada dana kelurahan yang dikucurkan, hal ini akan memacu meningkatkan partisipasi masyarakat karena telah ada dana dan tinggal diberdayakan.
2. Untuk sinkronisasi kegiatan program yang lebih baik, maka setiap informasi yang ada berjalan dan mengalir tersampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan system informasi berbasis teknologi baik telepon genggam maupun email kepada pihak kelurahan dan kepala lingkungan. Selain itu perlu dimanfaatkan program pemerintah kota manado yang berbasis aplikasi.
3. Untuk efektifnya sebuah program pemberdayaan masyarakat seperti program raskin, maka disarankan untuk pemerintah kecamatan Malalayang dapat menggunakan dan mensosialisasikan program qlue manado agar setiap keluhan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui aplikasi secara cepat agar dapat segera ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya

Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi ke-2 Rajawali Pers, Jakarta

Anholt, S. 2012. Foreword to special issue on place branding. *Journal of Brand Management*, Vol. 9, No. 4–5, June: 229–239.

Budiani NW. 2017. Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal ekonomi dan sosial*. [Internet]

Friedman John. 2012, *Empowerment : The Politics of Alternative Development* . Massachusetts: Blackwell Publishers

Gleydi Taroreh, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng. 2018. Berjudul Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Ejournal unsrat. Jurnal Eksekutif*.

Gunawan, Sumodiningrat. 2017. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas

Handyaningrat Soewarno, 2016, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

Kartasmita Ginanjar. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya; Bandung

Liang Gie. 2011. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta. Liberty.

- Moleong, Lexi J, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta.
- Nasdian FT. 2014. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 2, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nordholt K. H. dan Gerry V. 2011. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Poerwardarminta W.J.S. 2010. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka Nasional.
- Subejo dan Supriyanto.2014. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat , Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV
- Sumaryadi. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Suryaningrat. B. 2009. Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Edisi revisi. Jakarta. PT. Gunung Agung.
- Stoner, James A.F dan Charles W., 2011, Management, New Jersey: Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs
- Swedianti, Karina. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- United Nations. 2015. Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. United Nations
- Wasistiono S. 2010. Prospek Pembangunan Desa. CV. Bandung. Bandung
- Westra Pariada. 2013. Ensiklopedia Administrasi. Cetakan kesembilan. PT. Gunung Agung. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan